

## **Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan Di Kota Makassar**

Faidul Adzim  
Universitas Muhammadiyah Makassar

### **Abstract**

This study aims (1) to know and analyze the influence of the attitude of the leadership of the company against taxpayer compliance bodies in the city of Makassar. (2) to know and analyze the influence of company's financial condition influence to taxpayer compliance agency in Makassar City. (3) to know and analyze the influence of corporate climate have an effect on taxpayer compliance in Makassar City. (4) to know and analyze the dominant factors influencing the taxpayer compliance of the agency in Makassar City. The instrument used for data collection is the next questionnaire data is processed and analyzed using multiple regression.

The conclusion of this research are (1) tax compliance attitude have positive and significant effect to tax compliance for corporate taxpayer in Makassar City. The more positive the attitude of a corporate leader to tax compliance the higher the level of tax compliance agency. Conversely, the more negative the attitude of a company leader (in this case means not supporting) to tax compliance the lower the level of tax compliance. (2) The financial condition has a positive effect on Corporate Tax Compliance although not significant. The company's financial condition is good, then the Leader of the company will be obedient in carrying out the corporate taxation obligation which he represent or can be said high tax compliance level. These results reflect that the company's financial condition as reflected in the level of profitability and cash flow has proven to be one of the factors affecting the company's compliance with tax laws because profitability will pressure the company to report its taxes. (3) Organizational climate has a positive effect on Agency Tax Compliance significantly. A positive corporate organization climate will lead to high levels of tax compliance or vice versa. These results illustrate that a positive organizational climate will support corporate leaders to behave obediently. (4) Attitudes of tax compliance is the most dominant variable of influence on taxpayer compliance bodies in the city of Makassar. This indicates that the attitude of a positive corporate leadership in terms of understanding the rules and tax obligations will also behave positively in the reporting and payment of tax obligations.

### **Latar Belakang**

Memasuki Pembangunan Jangka Panjang Kedua pemerintah Indonesia berusaha menggalakkan sumber penerimaan negara khususnya sumber utamanya yaitu dari sektor pajak. Langkah pemerintah dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut system self assessment yakni suatu sistem pemungutan pajak yang meberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Elia Mustikasari, 2007). Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Penerapan sistem *self assessment* akan efektif jika kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Mustikasari (2007) mengatakan bahwa kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka *tax ratio* (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Angka ini merupakan sebuah rasio yang dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara) dan angka *tax gap* (kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya).

Pajak pada dasarnya bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan yang memuat aspek transparansi melalui komunikasi dan partisipasi serta Amendement UU Perpajakan yang dikaitkan sesuai fungsi sistem administrasi perpajakan agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (WP).

Untuk menilai seberapa baik dalam mengumpulkan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi pajak seperti: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara uniform untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. (Purnomo, 2004).

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

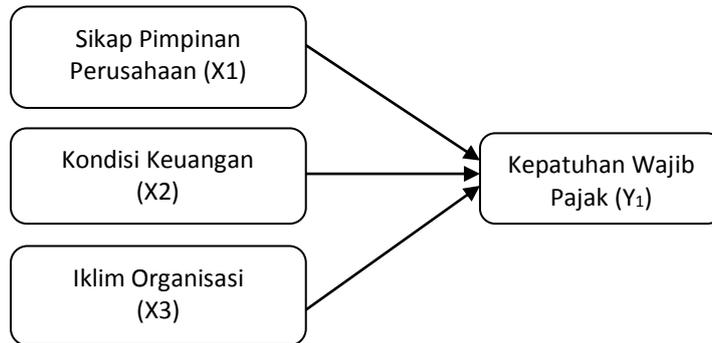
Permasalahan tentang *Tax Compliance* (terkait dengan bagaimana memasukkan dan melaporkan tepat pada waktunya semua informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan) merupakan permasalahan lama dalam bidang perpajakan. Penelitian tentang *Tax Compliance* (Kepatuhan Pajak) pun sudah sering dilakukan. Sebelum tahun 1982, literatur akademis empiris tentang *Tax Compliance* masih sangat sedikit dan penelitian tersebut menggunakan desain survey. Perkembangan berikutnya setelah tahun 1980'an riset tentang kepatuhan kebanyakan menggunakan desain eksperimental. Fokus penelitian rata-rata adalah perilaku para pembayar pajak (tax payer) dan pengaruh berbagai macam variabel terhadap perilaku kepatuhan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah administrasi perpajakan. Saat ini, kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses (menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya) karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya (de Jantscher: 1997).

## **Kerangka Penelitian**

Kerangka pemikiran penelitian tersebut di atas dapat digambarkan secara sederhana melalui bagan pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Penelitian



## Konsep Perpajakan

Menurut Soemitro (1994), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Nurmantu (2003), unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia. "Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan" (Badudu dan Zain, 1994; 1013). Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok; atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi (Robbins, 2001:32). Internal Revenue Service (IRS) (dalam Mustikasari 2007) mendefinisikan *Tax Compliance* sebagai "accurate, timely and fully paid return without IRS enforcement effort". Dengan demikian *Tax Compliance* dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan; mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan.

Menurut Chaizi Nasucha (2004), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Erard dan Feinstin (1994) seperti dikutip Chaizi Nasucha (2004), menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Permasalahan tentang *Tax Compliance* merupakan permasalahan lama dalam bidang perpajakan. Dalam membahas permasalahan ini dapat menggunakan berbagai perspektif. Menurut James et al (1998) dalam Mustikasari (2007), perspektif tersebut diantaranya keuangan publik, penegakan hukum, persediaan tenaga kerja, etika dan kombinasi dari perspektif tersebut. Sebelum tahun 1982, literatur akademis empiris tentang *Tax Compliance* masih sangat sedikit dan penelitian tersebut menggunakan desain survey. Responden yang disurvei adalah pembayar pajak untuk mengetahui perilaku mereka. Perkembangan berikutnya setelah tahun 1980'an riset tentang kepatuhan kebanyakan menggunakan desain eksperimental.

Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo, pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

Hadi Purnomo menyatakan tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu pertama dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi Wajib Pajak yang belum patuh, kedua adalah meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan, ketiga meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan (*combatting noncompliance*).

## **Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak**

Secara teoritis, banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, namun penelitian ini membatasi pada beberapa variabel saja. Variabel dimaksud meliputi sikap, kondisi keuangan, iklim organisasi, dan tarif pajak.

### **1. Sikap**

Alport dalam Tri Rusmi Widayatun (1999) dalam Purwaningsih (2010) sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Seiring dengan pendapat G.W. Alport di atas Tri Rusmi Widayatun memberikan pengertian sikap adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya.

Jalaluddin Rakhmat (1996:39) mengemukakan lima pengertian sikap, yaitu: Pertama, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap boleh berupa benda, orang, tempat, gagasan atau situasi, atau kelompok.

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Menurut Thurstone (1931) dalam Jatmiko (2006), sikap dipandang sebagai perasaan baik memihak atau melawan suatu objek psikologis. Sedangkan menurut Berkowitz (1972) dalam Darmayanti (2004), sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Sikap mempunyai peran penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi dan status kepribadian. Secara timbal balik, faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap dan perilaku.

Kecenderungan adalah kecondongan atau tendensi pribadi Pimpinan perusahaan untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keputusan adalah keputusan pribadi yang dipilih Pimpinan perusahaan untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan perpajakan. Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000) dan Hanno & Violette (1996), telah membuktikan secara empiris, bahwa niat berpengaruh secara positif signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.

Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat nilai seseorang untuk memunculkan

perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (actual behavioral control) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut.

## **2. Kondisi Keuangan**

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (*cash flow*). Perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas.

Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005). Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

## **3. Iklim Organisasi**

Perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan dimana individu tersebut berada. Diduga, keputusan untuk mematuhi peraturan bagi suatu perusahaan dipengaruhi oleh iklim perusahaan. Iklim keorganisasian merupakan persepsi bersama (Share Perception). Reichers dan Schneider (1990) dalam Mustikasari (2007), mengatakan bahwa iklim keorganisasian merupakan persepsi bersama dari kebijakan-kebijakan organisasi, praktik-praktik dan prosedur-prosedur, baik formal maupun tidak formal.

Iklim keorganisasian yang positif akan mendukung Pimpinan perusahaan untuk berperilaku patuh. Sebaliknya, jika iklim keorganisasiannya negatif akan mendorong Pimpinan perusahaan yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh semakin tidak patuh. Vardi (2001) dalam Mustikasari (2007), secara empiris telah membuktikan bahwa iklim keorganisasian berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku Organizational Misbehavior (OMB). Lussier (2005) dalam Mustikasari (2007) menjelaskan, bahwa pada umumnya 7 dimensi iklim keorganisasian yang sering diteliti adalah sebagai berikut: (1) struktur, (2) kewajiban, (3) imbalan, (4) keakraban (*warmth*), (5) dukungan, (6) identitas organisasi dan loyalitas, dan (7) risiko

## **4. Keadilan Tarif Pajak**

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yg adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.

Azmi dan Perumal (2008) meneliti pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak di Malaysia. Penelitian ini juga mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Gerbing (1988). Hasil analisis faktor yang dilakukan terhadap dimensi-dimensi keadilan pajak ini dapat diketahui bahwa terdapat tiga dimensi keadilan pajak yang berpengaruh signifikan, yaitu keadilan umum (*general fairness*), struktur pajak (*tax structure*), dan kepentingan pribadi (*self interest*). Perbedaan hasil ini dipengaruhi dengan adanya perbedaan pendidikan atau pengetahuan atas perpajakan dan kultur budaya antara Malaysia dan negara-negara pada penelitian sebelumnya.

## **Metode Penelitian**

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisisioner. Mereka yang diberikan kuisisioner adalah perusahaan-perusahaan pengembang perumahan yang tergabung dalam organisasi Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengusaha Perumahan dan Permukiman (APERSI) Propinsi Sulawesi Selatan.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data penelitian yang bukan angka, yang sifatnya tidak dapat dihitung, berupa informasi atau penjelasan yang didasarkan pada pendekatan teoritis dan penilaian logis. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara (Sugiyono, 2004 dalam Jatmiko, 2006). Data diperoleh dari jawaban para pimpinan perusahaan yaitu jawaban terhadap serangkaian pertanyaan kuesioner yang diajukan dari peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah seluruh pimpinan perusahaan yang tergabung dalam organisasi Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (APERSI) di Kota Makassar. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan perusahaan dengan kriteria: (1) telah menjabat minimal 1 tahun, dan (2) pernah mengisi SPT.

## **Teknik Analisis Data**

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena data yang digunakan adalah data kualitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 17.00 for Windows.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu melihat pengaruh sikap terhadap kepatuhan pajak, niat untuk berperilaku patuh, kondisi keuangan, fasilitas perusahaan, dan iklim organisasi perusahaan terhadap kepatuhan pajak badan. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pajak

X1 = Sikap pimpinan perusahaan

X2 = Kondisi keuangan perusahaan

X3 = Iklim organisasi

B0 = Konstanta

B1 – B4 = Koefisien regresi

E = Faktor kesalahan

## Hasil Penelitian

### Deskripsi Responden

Penelitian dilakukan di Kota Makassar, objek utama adalah kepatuhan pajak para wajib pajak badan dengan sampel perusahaan yang bergerak di bidang pengembang perumahan (property). Identitas responden yang akan dideskripsikan meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lama memimpin perusahaan.

#### 1. Jenis Kelamin

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Klasifikasi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	42	64,62
2.	Perempuan	23	35,38
	Total	65	100.00

Sumber : Data primer setelah diolah, 2011

Berdasarkan jenis kelamin dapat digambarkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang atau 64,62 % dan sisanya adalah perempuan sebanyak 23 orang atau 35,38 %. Dengan demikian tampak bahwa pimpinan perusahaan di sektor perumahan terlihat cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan.

#### 2. Tingkat Pendidikan

Hasil penelitian mengenai tingkat pendidikan responden ditunjukkan pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Sarjana S-2	8	12,31
2.	Sarjana S-1	33	50,77
3.	Diploma	14	21,54
4.	SLTA	10	15,38
	Jumlah	65	100,00

Sumber : Data primer diolah, 2011

Data yang ditunjukkan pada tabel 4.2 tersebut di atas menunjukkan bahwa umumnya responden dalam penelitian ini memiliki jenjang pendidikan sarjana strata satu yaitu sebanyak 33 orang responden atau 50,77 %, kemudian sarjana diploma sebanyak 14 orang atau 21,54 %, yang berpendidikan sarjana strata dua sebanyak 8 orang atau 12,31 %, dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 10 orang atau 15,38 %.

#### 3. Lama Memeimpin Perusahaan

Hal ini penting digambarkan terutama untuk memperoleh informasi bahwa para responden telah berpengalaman dalam melaporkan kewajiban pajak perusahaan yang dipimpinnya.

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Lamanya Memimpin Perusahaan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase(%)
1.	1 – 2 tahun	12	18,46
2.	3 – 4 tahun	17	26,15
3.	5 – 6 tahun	15	23,08
4.	7 – 8 tahun	10	15,38
5.	9 – 10 tahun	7	10,77
6.	Di atas 10 tahun	4	6,15
Jumlah		65	100,00

Sumber : Data primer diolah, 2011

Berdasarkan data pada tabe 4.3 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden penelitian sudah memimpin perusahaan antara 1 (satu) sampai dengan 8 tahun. Secara rinci dapat diuraikan bahwa 12 orang atau 18,46% sudah memimpin perusahaan selama 1 – 2 tahun, 17 orang atau 26,15% memimpin perusahaan selama 3 – 4 tahun, 15 orang atau 23,08% memimpin perusahaan selama 5 – 6 tahun, 10 orang atau 15,38% memimpin selama 7 – 8 tahun, 7 orang atau 10,77% memimpin perusahaan selama 9 – 10 tahun, dan 4 orang atau 6,15% sudah memimpin perusahaan di atas 10 tahun. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya para responden sudah seringkali bersentuhan dengan persoalan pajak, paling tidak selama setahun terakhir pernah melaporkan dan membayar pajak badan dari perusahaan yang dipimpinya.

### Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Guna mengungkapkan hasil penelitian berdasarkan variabel-variabel yang diperhatikan, maka penulis akan menggambarkan data-data hasil penelitian untuk tiap variabel yang terdiri dari sikap pimpinan perusahaan ( $X_1$ ), kondisi keuangan ( $X_2$ ), dan iklim organisasi ( $X_3$ ) sebagai variabel independent sementara variabel bebas (dependent variable) adalah kepatuhan pajak (Y). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

#### Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Sikap	65	9.00	23.00	15.6769	3.89755
Kondisi Keuangan	65	2.00	10.00	8.1538	1.65105
Iklim Organisasi	65	14.00	37.00	26.9231	5.22107
Kepatuhan Pajak	65	8.00	28.00	17.0615	5.63160
Valid N (listwise)	65				

Sumber : Output SPSS

### Analisis Regresi

Untuk menguji hipotesis penelitian maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu melihat pengaruh sikap kepatuhan pajak, kondisi keuangan, dan iklim organisasi perusahaan terhadap kepatuhan pajak badan. Hasil analisis regresi sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Olah Data

<b>Koefisien</b>	<b>Nilai B</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
Konstanta	-0.403	-.662	0.510
Sikap kepatuhan pajak (X1)	0.422	3.372	0.001
Kondisi keuangan (X2)	0.048	0.394	0.695
Iklim organisasi (X3)	0.289	2.490	0.016
F hitung = 8,894	R = 0,552		
Sig. = 0,000	R <sup>2</sup> = 0,304		

Sumber : Lampiran pengolahan data

Berdasarkan hasil olah data tersebut, diperoleh persamaan regresi berikut ini.

$$Y = -0,403 + 0,422 X_1 + 0,048 X_2 + 0,289 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda seperti di atas, selanjutnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien  $b_0$  sebesar -0,403 berarti apabila variabel-variabel X sama dengan nol maka diperkirakan kepatuhan pajak wajib pajak badan akan menurun.
2. Nilai koefisien  $b_1 = 0,422$  menunjukkan adanya pengaruh yang searah antara sikap kepatuhan pajak dengan kepatuhan pajak wajib pajak badan di Kota Makassar. Artinya, apabila sikap kepatuhan pajak baik maka tingkat kepatuhan pajak diprediksi juga akan baik dengan asumsi variabel lainnya konstan atau tetap.
3. Nilai koefisien  $b_2 = 0,048$  menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kondisi keuangan dengan kepatuhan pajak wajib pajak badan di Kota Makassar. Hal ini berarti jika kondisi keuangan perusahaan mendukung atau tidak bermasalah maka diperkirakan kepatuhan pajak wajib pajak badan di Makassar juga akan meningkat.
4. Nilai koefisien  $b_3 = 0,289$  menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel iklim organisasi dengan kepatuhan pajak. Artinya, jika iklim organisasi mendukung maka dapat diprediksi kepatuhan pajak wajib pajak badan di Kota Makassar juga akan baik.

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa seluruh variabel yang dimasukkan dalam model seperti ditunjukkan pada persamaan regresi di atas semuanya memiliki pengaruh yang positif (searah) sehingga jika variabel-variabel ini mendukung maka diperkirakan akan menyebabkan tingkat kepatuhan pajak akan baik pula.

Hasil olah data untuk ANOVA menunjukkan nilai F (Value) = 8,894 dengan nilai P (Prob > F) atau signifikansi 0,000<sup>a</sup> memberikan informasi tentang signifikansi model pada taraf kepercayaan 95 % ( $\alpha = 0,05$ ), ini berarti model yang dipakai signifikan secara statistik karena  $P < \alpha = 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). Karena model signifikan, maka penafsiran, peramalan atau inferensi yang lain dapat dilakukan dengan menggunakan model regresi tersebut.

Tingkat korelasi variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh nilai R sebesar 0,552 yang memberikan informasi bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara variabel sikap kepatuhan pajak, kondisi keuangan, dan iklim organisasi terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan di Kota Makassar. Besarnya daya ramal model diberikan oleh nilai koefisien determinasi yang disimbolkan dengan  $R^2$  (R-Square) sebesar 0,304 yang berarti model mempunyai daya ramal sebesar 30,4 % atau sekitar 30,4 % variasi naik turunnya kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh model atau dengan kata lain variasi perubahan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel sikap kepatuhan pajak, kondisi keuangan, dan iklim organisasi sedang sisanya sebesar 69,6 % diakibatkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis.

Berdasarkan uji parsial yang dilakukan terhadap variabel-variabel yang dimasukkan dalam model analisis diketahui bahwa terdapat dua variabel penelitian yang signifikan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak, yaitu variabel sikap kepatuhan ( $X_1$ ) dan variabel

iklim organisasi ( $X_3$ ), sedangkan untuk variabel kondisi keuangan ( $X_2$ ) berpengaruh tetapi tidak signifikan. Dari dua variabel yang signifikan dapat diketahui bahwa variabel sikap kepatuhan pajak ( $X_1$ ) merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya dibanding dua variabel bebas lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai beta dan nilai t hitung yang paling besar. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_4$ ) terbukti secara empiris dan diterima.

## **Kesimpulan**

1. Sikap kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak badan di Kota Makassar. Semakin positif sikap seorang pimpinan perusahaan terhadap kepatuhan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak badan. Sebaliknya, semakin negatif sikap seorang pimpinan perusahaan (dalam hal ini berarti tidak mendukung) terhadap kepatuhan pajak maka semakin rendah tingkat kepatuhan pajak.
2. Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Badan walaupun tidak signifikan. Kondisi keuangan perusahaan baik, maka Pimpinan perusahaan akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang dia wakili atau bisa dikatakan tingkat kepatuhan pajaknya tinggi. Hasil ini mencerminkan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (*cash flow*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya.
3. Iklim organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Badan secara signifikan. Iklim organisasi perusahaan yang positif akan menyebabkan tingkat kepatuhan pajaknya tinggi atau sebaliknya. Hasil ini menggambarkan bahwa iklim keorganisasian yang positif akan mendukung pimpinan perusahaan untuk berperilaku patuh.
4. Sikap kepatuhan pajak merupakan variabel paling dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan di Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pimpinan perusahaan yang positif dalam arti memahami peraturan dan kewajiban pajaknya akan berperilaku positif pula dalam pelaporan dan pembayaran kewajiban pajaknya.

## **Rekomendasi**

1. Bagi pimpinan perusahaan, disarankan agar memanfaatkan penemuan penelitian ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungannya, bahwa sikap kepatuhan dan iklim organisasi terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Untuk pelaksanaan penelitian lanjutan, terutama bagi pihak-pihak yang menaruh minat untuk mengkaji masalah perpajakan disarankan menggunakan wajib pajak badan pada skala yang lebih luas tidak hanya pada sektor properti sehingga dapat diperoleh bukti empiris baru berkaitan dengan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak badan.

## **Referensi**

- Bradley, Cassie Francies, 1994. An Empirical Investigation of Factors Affecting Corporate Tax Compliance Behavior. Dissertation, The University of Alabama, USA.
- Darmayanti, Theresia Woro, 2004. Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume X No. 1, 109-128.

- Dimensi Budaya Hofstede.” JAAI, Vol. 6 No 1. Juni 2002. Diakses tanggal 29 April 2011 dari <http://google.co.id/>
- Hanno, D.M. and G.R. Violette 1996. An Analysis of Moral and Social Influences on Tax Payer Behavior. Behavioral Research in Accounting, 8 (Supplement).
- Richardson, Grant. 2006. “The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong”, International Tax Journal
- Sulyanto. 2002. Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran. Bogor; Penerbit Ghalia Indonesia.
- Kiryanto, 1999. Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Interen Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Pajak Penghasilannya. Simposium Nasional Akuntansi II: 1-13
- Mardiasmo, 2002. Perpajakan. Edisi revisi, Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mustikasari, Elia, 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X:1-42